

**STUDI PENINGKATAN PELAYANAN OPERASIONAL
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI KOTA BANDA ACEH**

TUGAS AKHIR

Oleh:

DINAR DWIRIANSYAH

L2D 099 418



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

ABSTRAK

Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan kota dan penduduk membutuhkan adanya pelayanan yang seimbang dari sarana dan prasarana perkotaan tersebut. Salah satu masalah yang dihadapi adalah meningkatnya volume sampah perkotaan yang tentu saja membutuhkan pengelolaan yang tepat. Prinsip dari pengelolaan sampah adalah membersihkan kota dari sampah. Pengelolaan sampah terdiri dari lima aspek pengelolaan, yaitu aspek teknis operasional, pembiayaan, organisasi, legalitas dan peran serta masyarakat. Dalam studi ini, lebih difokuskan pada aspek teknis operasional terutama yang berkaitan dengan kemampuan pelayanan operasional pengelolaan persampahan yang dilihat dari ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah yaitu fasilitas pengumpulan dan fasilitas pengangkutan.

Di Kota Banda Aceh, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini dilihat dari masih kurangnya kemampuan pelayanan operasional pengelolaan sampah. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat kemampuan angkut sampah ke pembuangan akhir yang hanya mampu mengangkut sekitar 31,14 % total timbulan sampah kota. Keterbatasan pelayanan operasional persampahan ini dapat disebabkan oleh jumlah dan persebaran fasilitas pengelolaan sampah yang masih kurang. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dari studi ini adalah memberikan arahan mengenai upaya peningkatan kemampuan pelayanan operasional pengelolaan persampahan di Kota Banda Aceh. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan seluruh sampah yang dihasilkan di Kota Banda Aceh dapat terlayani.

Dalam studi ini, analisis yang dilakukan adalah melalui pendekatan deskriptif, normatif dan spasial. Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang dilakukan untuk menggambarkan kondisi pengelolaan persampahan di Kota Banda Aceh. Sedangkan pendekatan normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting yang ada dengan standar yang ada, seperti standar fasilitas pengumpulan maupun pengangkutan. Sementara pendekatan spasial dilakukan untuk menentukan wilayah pelayanan pengelolaan persampahan. Analisis yang dilakukan antara lain analisis volume timbulan sampah, analisis pelayanan operasional pengelolaan sampah eksisting dan analisis pemenuhan kebutuhan pelayanan operasional pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh yang mengambil input dari dua analisis sebelumnya.

Dari analisis ini, dihasilkan arahan mengenai peningkatan pelayanan operasional pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh. Arahan tersebut adalah meningkatkan penyediaan fasilitas pengumpulan menjadi 109 unit dengan personil sebanyak 215 orang dan fasilitas pengangkutan menjadi 53 unit dengan personil sebanyak 159 orang dengan banyaknya frekuensi pengangkutan sebanyak dua kali sehari. Hasil ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan di Kota Banda Aceh. Untuk penerapannya perlu ada studi-studi lanjutan yang lebih detil dalam pembahasannya.

Kata Kunci: *Timbulan sampah, teknik operasional, peningkatan pelayanan*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang pesat dan bertambahnya jumlah penduduk di suatu kota dengan berbagai aktivitas yang dilakukannya, akan menimbulkan berbagai permasalahan yang membutuhkan pengelolaan terhadap pembangunan kota yang baik. Salah satu permasalahan tersebut adalah meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh suatu kota. Sampah merupakan segala bentuk limbah yang ditimbulkan dari kegiatan manusia maupun binatang yang biasanya berbentuk padat dan secara umum sudah dibuang, tidak bermanfaat dan tidak dibutuhkan lagi.

Sampah akan terus diproduksi selama manusia masih hidup dan melakukan kegiatannya sehari-hari di wilayah yang mereka tempati. Volume sampah yang semakin tinggi jika tidak dikelola dengan baik dan benar sangat berpotensi untuk menimbulkan berbagai masalah yang cukup serius diantaranya permasalahan lingkungan dan kesehatan bagi lingkungan dan manusia. Untuk itu maka perlu adanya suatu pengelolaan persampahan yang baik mulai dari sumber sampah sampai dengan pembuangan akhir yang memerlukan lahan khusus (Tchobanoglous, 1977).

Masalah pengelolaan persampahan atau kebersihan di wilayah perkotaan masih belum menjadi prioritas pembangunan yang sejajar dengan pembangunan perkotaan lainnya. Sebagian besar perencanaan kota belum mempunyai perencanaan sistem pengelolaan sampah yang profesional, sehingga pembangunan di bidang pengelolaan sampah ini seringkali tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di bidang lain dan tidak dapat mengejar permasalahan yang timbul (Sri Bebasari, 2002). Tujuan dari pengelolaan sampah adalah menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman (Tchoboglaus, 1977). Pengelolaan sampah di Indonesia secara umum terbagi ke dalam lima aspek pengelolaan, yaitu: aspek teknis operasional, aspek pembiayaan, aspek hukum atau legalitas, aspek organisasi, dan aspek peran serta masyarakat. Kelima aspek pengelolaan saling terkait satu sama lain dan seyogyanya berjalan secara terpadu untuk menciptakan pengelolaan sampah yang efektif.

Sumber utama permasalahan sampah perkotaan adalah rendahnya tingkat pelayanan umum sehingga mengakibatkan berbagai permasalahan lingkungan seperti pencemaran air, tanah dan udara. Secara nasional menurut Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (1987), hanya 40% dari sampah penduduk perkotaan yang terlayani oleh fasilitas umum, sedangkan sisanya dibakar atau dibuang ke badan air atau lahan terbuka (BPPT, 2002). Pada tahun 2020-an diperkirakan produksi sampah akan meningkat lima kali lipat dibanding pada tahun 1990-an. Peningkatan jumlah sampah terutama disebabkan oleh jumlah penduduk yang terus meningkat, meningkatnya konsentrasi penduduk di perkotaan atau pusat-pusat kawasan industri yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan urbanisasi, dan juga terjadinya produksi sampah per kapita yang diakibatkan oleh perubahan pola konsumsi masyarakat karena meningkatnya kesejahteraan, serta meningkatnya limbah industri pertanian (agroindustri) maupun industri non pertanian.

Kondisi ini menunjukkan bahwa masalah lingkungan akibat sampah pada masa-masa mendatang akan semakin besar, apalagi jika tidak diimbangi dengan upaya pengelolaan yang memadai. Permasalahan pengelolaan sampah lain yang dihadapi oleh pengelola sampah adalah biaya pengelolaan yang besar dimana sulit untuk dipenuhi oleh anggaran pemerintah daerah, sulitnya mencari lahan untuk pembuangan akhir, serta biaya operasional pengangkutan yang besar karena lokasi pembuangan akhir yang jauh dari sumber sampah. Untuk itu perlu adanya suatu usaha pengelolaan yang memadai agar permasalahan sampah dapat dikurangi.

Kota Banda Aceh yang menjadi sasaran dalam studi ini merupakan ibukota dari Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terletak di ujung paling barat Pulau Sumatera. Pengambilan Kota Banda Aceh sebagai lokasi studi adalah karena kondisi pengelolaan persampahan terutama dalam aspek teknis operasional yang menjadi penekanan studi ini di kota tersebut yang dirasa masih kurang baik dan masih perlu untuk ditingkatkan lagi.

Peningkatan volume sampah di Kota Banda Aceh bisa dilihat dari beberapa hal, yaitu adanya peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya dan juga adanya peningkatan aktivitas kota. Jumlah penduduk Kota Banda Aceh setiap tahunnya mengalami peningkatan. Angka pertumbuhan penduduk di Kota Banda Aceh adalah sebesar 3,14 % setiap tahunnya (Revisi RTRW Kota Banda Aceh, 2001-2010). Jumlah penduduk pada tahun 1998 adalah sebesar 212.322 jiwa dan pada tahun 2000 sebesar 220.737. Pada tahun

2002, jumlah penduduk Kota Banda Aceh menjadi 225.996 jiwa. Peningkatan jumlah sampah di suatu kota berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk di kota tersebut, sehingga adanya peningkatan jumlah penduduk di Kota Banda Aceh akan meningkatkan jumlah sampah yang dihasilkan oleh Kota Banda Aceh.

Hal lain yang dapat menyebabkan peningkatan volume timbulan sampah adalah peningkatan aktivitas perkotaan. Peningkatan aktivitas perkotaan di Kota Banda Aceh selain dari peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya juga dapat dilihat dari perubahan guna lahan yang terjadi. Semakin tingginya aktivitas suatu kota ditandai dengan semakin berkurangnya lahan untuk pertanian dan semakin luasnya lahan terbangun. Di Kota Banda Aceh, luas lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian setiap tahunnya mengalami penurunan sementara luas lahan terbangun di Kota Banda Aceh semakin bertambah. Pada tahun 2000, luas areal persawahan adalah sebesar 586 Ha pada tahun berikutnya luas areal persawahan semakin menurun, yaitu 440 Ha pada tahun 2001 dan 409 Ha pada tahun 2002 (BPS Kota Banda Aceh, 2003). Sebaliknya luas lahan terbangun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2000, luas lahan terbangun sebesar 4221 Ha, pada tahun berikutnya luas lahan terbangun semakin meningkat yaitu 4510 Ha dan 4890 Ha pada tahun 2002 (BPS Kota Banda Aceh, 2003). Peningkatan aktivitas kota berpotensi untuk menimbulkan sumber-sumber sampah baru seperti misalnya lahan yang dulunya digunakan untuk aktivitas pertanian telah berubah penggunaannya menjadi aktivitas perdagangan dan jasa yang tentu saja berpotensi untuk meningkatkan volume timbulan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan aktivitas perkotaan di Kota Banda Aceh mengakibatkan volume timbulan sampah juga meningkat.

Peningkatan volume timbulan sampah seperti yang dijelaskan di atas tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan di Kota Banda Aceh. Hal ini menyebabkan perlunya pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh. Pengelolaan persampahan di Kota Banda Aceh saat ini dilakukan oleh pemerintah kota melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh. Pemerintah kota dalam pengelolaan sampah memiliki beberapa potensi diantaranya keberadaan tempat pembuangan akhir sampah (TPA) yang bernama TPA Gampong Jawa yang diperhitungkan masih dapat bertahan hingga 10 tahun ke depan (tahun 2014) dan juga adanya sarana perbengkelan sehingga dapat menghemat biaya pemeliharaan dari penggunaan armada operasional dibandingkan bila harus melakukan pemeliharaan armada di pihak lain (DKP Kota Banda Aceh, 2003).